

Memperbaiki Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi

1. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sebagian besar berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa. Menurut data KPK, dari 468 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, 50 persen atau sedikitnya 224 kasus berasal dari Pengadaan Barang dan Jasa. Di lain pihak, saat ini pemerintahan Jokowi-JK sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur/ proyek strategis nasional. Tahun 2015, anggaran infrastruktur pun dipatok sebesar Rp 290,3 triliun, yang merupakan anggaran infrastruktur tahunan terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Jumlah tersebut meningkat hampir Rp 100 triliun dibandingkan anggaran infrastruktur tahun sebelumnya. Sementara itu sepertiga dari total APBN tahun 2016, atau sekitar Rp 300 triliun, merupakan belanja modal. Ada korelasi antara proyek infrastruktur Jokowi dengan pengadaan barang dan jasa. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi berulang kali menginstruksikan kepada para menterinya untuk melakukan lelang pengadaan barang dan jasa lebih awal sehingga pada awal-awal tahun diharapkan aktivitas ekonomi sudah bisa bergulir.

Pengadaan barang dan jasa untuk pengelolaan proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran cukup besar tentulah harus dilakukan dengan cara yang baik. Sebab ada potensi penyimpangan yang cukup besar dalam pengelolaan anggaran yang besar. Dengan besarnya anggaran yang disediakan, bukan berarti masalah tidak ada. Permasalahan yang muncul adalah masalah manajemen dan ketidaksiapan aparat atau pejabat pengelola anggaran dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia sesuai dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai.

Selain itu juga adanya keengganan para pelaksana proyek untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan sistem elektronik. Kebanyakan mereka memilih memakai sistem swakelola dan memecah proyek menjadi proyek-proyek yang kecil nilainya. Masalah-masalah ini apabila tidak segera diatasi akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dan berburu rente dari anggaran negara untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya. Potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pun mengancam.

Salah satu solusi yang kemudian ditawarkan adalah melalui perencanaan anggaran yang matang, penganggaran dan pengadaan yang terintegrasi.

Segala upaya terus dilakukan oleh pemerintah, yakni Pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan baru melalui Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2012 dengan berbagai penyempurnaan melalui perubahan pertama Perpres Nomor 65 tahun 2011 dan terakhir Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 merupakan perubahan ke-dua, Perpres No. 172 tahun 2014 dan terakhir Perpres No.4 Tahun 2015

Meskipun tata kelola pengadaan barang dan jasa sudah mulai dibenahi, namun permasalahan tidak berarti selesai. Pelibatan publik untuk terus melakukan pemantauan masih perlu dilakukan.

Pembenahan bisa jadi memiliki banyak dimensi dan aspek. Untuk membahas hal tersebut, Indonesia Anti Corruption Forum (IACF) akan mengangkat tema Memperbaiki Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari diadakannya diskusi ini adalah untuk:

- Mengidentifikasi persoalan yang berpotensi pada penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah;
- Mengidentifikasi dan membahas masalah perbaikan dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa;
- Menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa terutama untuk mencegah tindak pidana korupsi.

3. Narasumber

Narasumber dalam kegiatan diskusi ini antara lain:

- Patria Susantosa (LKPP);
- Larto Untoro (Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) KPK);
- Ikak G. Patriastomo (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia);
- Sabrina Dyah Nayabrani (Universitas Gajah Mada);
- Paulus Aluk Fajar Dwi Santo (Universitas Bina Nusantara);
- Sabela Gayo (Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia)

Moderator: Lais Abid (ICW)

4. Waktu dan Tempat

Kegiatan akan diadakan pada :

Tanggal : Selasa, 29 November 2016
Waktu : Pukul 13.00-17.00 WIB
Tempat : Universitas Bina Nusantara, Kampus Anggrek kemanggisan